



Analisis Tingkat Kriminalitas di Provinsi Dengan Pendekatan Data Panel

Criminality Rate Analysis in Province Using Panel Data Approach

Neng Murialti¹, Muhammad Fikry Hadi²

¹²Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru

Email: Nengmurialti@umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 07 Mei 2023

Accepted: 18 Juni 2023

Published: 30 Juni 2023

Keywords: *competence; achievement motivation; job satisfaction; teacher performance*

DOI:10.37859/jae.v13i1.4874

JEL Classification:

O1 (O15), M5 (M54)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel kepadatan penduduk, Pendidikan, kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat upah dan migrasi terhadap tingkat kriminalitas pada 6 kabupaten /kota di Provinsi Riau tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga variabel kepadatan penduduk, tingkat pengangguran dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas sedangkan variabel Pendidikan, positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kriminalitas, sedangkan tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas dan untuk variabel migrasi masuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas pada 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2017-2021.

This study aims to find out how the influence of population density, education, poverty, unemployment, wage and migration rates on the level of crime in 6 regencies /cities in Riau Province in 2017-2021. The results of this study show that three variables of population density, unemployment and poverty have no significant effect on the level of criminality while the educational, positive and significant variables affect the level of crime, while the wage level has a negative and significant effect on crime rates and for migration variables enter positive and significant effects on Criminal level in 6 districts/cities in Riau Province in 2017-2021.

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu dari 38 provinsi di Indonesia yang memiliki pendapatan perkapita tertinggi. Berdasarkan pengelompokannya, Provinsi Riau termasuk dalam lima besar pendapatan tertinggi di Indonesia yang menempati urutan ke 4 setelah provinsi Kalimantan Utara. Besaran pendapatan perkapita yang dihasilkan adalah sebesar 149.9 juta pertahun. Sedangkan di Pulau Sumatera Provinsi Riau menempati urutan pertama dari provinsi-provinsi yang ada di pulau Sumatera (BPS, Indonesia 2022). Sebagai provinsi dengan pendapatan perkapita tertinggi di pulau Sumatera menjadi Riau sebagai tempat tujuan bagi banyak orang untuk mencari penghidupan yang lebih baik, hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas di provinsi Riau.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kasus kriminalitas di provinsi Riau menunjukkan penurunan namun provinsi Riau masih berada di urutan ke 8 sebagai provinsi dengan jumlah kriminalitas dari 38 provinsi yang ada di Indonesia ,

Tabel 1. Jumlah Kriminalitas dan Persentase Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Riau Periode 2017-2021

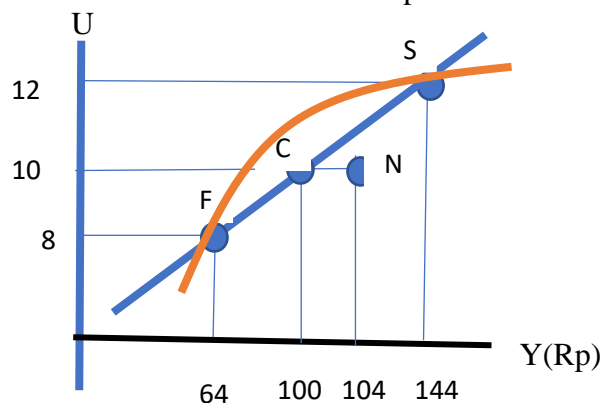
Tahun	Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan	Persentase Penyelesaian Kejahatan (%)
2017	8.760	71.60
2018	8.609	74.15
2019	7.373	75.21
2020	7.977	74.66
2021	7.569	75.50

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau

Provinsi Riau memiliki wilayah administrative 12 Kabupaten Kota, dalam penelitian ini diambil 6 Kabupaten Kota dengan rata-rata tingkat kriminalitas yang tinggi dari 12 kabupaten kota yang ada di provinsi Riau diantaranya berada di urutan pertama yakni kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, kabupaten Rohul, kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai.

Penelitian ini bertujuan menganalisis factor yang mempengaruhi jumlah kriminalitas yang ada di provinsi Riau dengan mengambil sampel 6 kabupaten kota yang memiliki rata-rata tingkat kriminalitas yang tinggi. Teori Ekonomi yang membahas tentang kriminalitas yang digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian ini adalah Teori Ekonomi Kriminalitas Karl Max. Menurut Karl Max Kriminalitas muncul merupakan bagian dari system ekonomi kapitalis. Menggunakan data statistik yang mencakup periode 25 tahun antara tahun 1836 dan 1861, Mary (1867) mengidentifikasi penelitian yang menyimpulkan bahwa kenaikan harga gandum berdampak pada peningkatan kejahatan (Boeger, 1970). Backer (1968) adalah pakar ekonomi yang melakukan kajian tentang kriminalitas. Melalui pendekatan ekonomi Becker mengklaim bahwa seseorang dapat melakukan pelanggaran ketika manfaat yang diharapkan melebihi manfaat yang akan mereka terima dengan menggunakan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk kegiatan lain. Beberapa orang menjadi seorang kriminal bukan karena motivasi dasar apapun, tetapi karena perhitungan dan keuntungan (benefit and cost) (Backer, 1968). Ekspektasi utilitas kriminalitas dapat di gambarkan melalui kurva di bawah ini:

Gambar 2.1
Ekspektasi utilitas kriminalitas



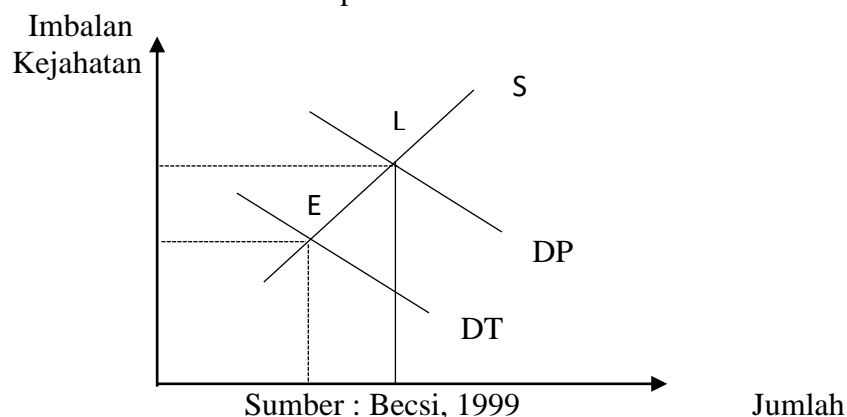
(sumber : Sullivan, Arthur O'. Urban Economics, 6th Edition, hal. 261.

Titik N merupakan kondisi indifferen dengan titik C sebagai pekerja ilegal. Tindakan kriminalitas akan terjadi jika expected utility dari tindakan tersebut lebih dari 10 dengan penurunan probabilitas ketahuan, penurunan upah pekerja legal dan peningkatan hasil rampasan kejahatan. Sebaliknya, jika utilitas yang diharapkan di bawah 10, peningkatan kemungkinan tertangkap, peningkatan upah pekerja legal, dan pengurangan kejahatan semuanya akan mengarah pada pengurangan kejahatan. Seperti yang dijelaskan Becsi (1999), pada umumnya juga ada sisi penawaran dan sisi permintaan pada tingkat ekuilibrium kejahatan dalam teori ekuilibrium.

Menurut Becs (1999), “beberapa faktor menyebabkan perubahan kurva penawaran, seperti faktor demografi (perubahan proporsi orang muda), kesempatan kerja yang terbatas pada tingkat upah tertentu, dan perubahan kebijakan penjara”.

Gambar 2.2

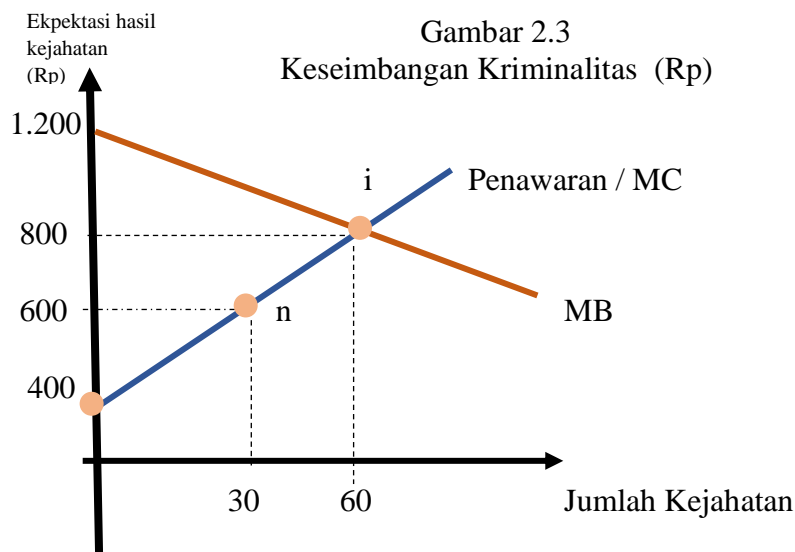
Permintaan dan penawaran Kriminalitas



Sumber : Becsi, 1999

Kejahatan

Diagram di atas menggambarkan bahwa proposisi kejahatan dimodelkan sebagai pilihan antara pekerjaan hukum di satu sisi dan aktivitas kriminal di sisi lain. Sedangkan di sisi permintaan, kejahatan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah permintaan langsung dari hasil kejahatan. Kedua, tuntutan tidak langsung terhadap kejahatan adalah kebalikan dari tuntutan perlindungan dan asuransi. Dengan meningkatnya jangkauan kejahatan, demikian pula kebutuhan publik untuk melindungi kejahatan.



Sumber : Sullivan (2007)

Jika jumlah kejahatan adalah 30, utilitas marjinal (MB) masih lebih besar dari biaya marjinal (MC). Jika utilitas marjinal (MB) masih lebih besar dari biaya marjinal (MC), maka tingkat kejahatan pada titik ekuilibrium akan terus meningkat dari 30 menjadi 60 dan harga penangkapan diperkirakan akan meningkat menjadi 1.200. Namun, jika pelaku terus melakukan kejahatan melebihi jumlah ini, kerugian diharapkan karena $MC > MB$. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya Tindakan kriminalitas yang akan di bahas dalam penelitian ini diantaranya :

Pengangguran

Tingkat pengangguran yang tinggi dari tahun ke tahun secara otomatis menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi negara/daerah tersebut melambat atau bahkan menurun (Mankiw, 2003). Menurut Sugiyanto, pengangguran yang sangat tinggi di tahun 2019 menyebabkan masalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang pada gilirannya menimbulkan jalan pintas dalam kejahatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut.

Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), dari perspektif ekonomi, kemiskinan dipandang sebagai tidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi kekurangan material dan sosial yang menyebabkan individu. Hidup di bawah standar hidup yang layak atau kondisi di mana individu mengalami kerugian relatif dibandingkan dengan orang lain dalam masyarakat Hall, A & Midgley (2014).

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kualitas penduduk. Karena kepadatan penduduk, pelayanan sosial dan kesehatan seperti sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi dan fasilitas pendukung kehidupan lainnya juga tidak memadai. Semakin padat penduduk suatu daerah, semakin banyak ruang bagi penjahat karena semakin kecil kemungkinan mereka untuk ditangkap. (Christiani, Tedjo, & Martono, 2014).

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia (SDM), investasi ini disebut modal manusia (human capital theory). Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dievaluasi sebagai sumber daya manusia, dengan harapan nilai populasi manusia yang berbeda jenis dan bentuknya setelah menjalani pendidikan akan meningkat nilainya.

seperti peningkatan pendapatan, pekerjaan. Produktivitas SDM yang tinggi dan peningkatan nilai rasional individu (manfaat sosial) jika dibandingkan sebelum memiliki pendidikan (Idris, 2007: 69). Menurut Todaro (2011), berpendapat bahwa “pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan teknologi modern dan mengembangkan kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan”.

Upah

Upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri, dan keluarganya (Sadono Sukirno, 2012). Menurut UU No. 13/2003, Upah minimum dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Rendahnya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh kekakuan upah (wage rigidity) yaitu tentang ketidakmampuan upah menyesuaikan diri dengan titik ekuilibrium di mana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. (Mankiv, 2012).

Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk untuk menetap di suatu tempat/kawasan yang melintasi batas administrasi kawasan tersebut (Setiadi, 1999). Pada umumnya migrasi penduduk mengarah pada daerah-daerah yang perkembangan ekonominya “subur”, karena faktor ekonomi sangat mempengaruhi pergerakan penduduk. Hal ini kembali ditegaskan oleh Sri Rum Giyarsih (2009) yang menyatakan bahwa migrasi sebenarnya merupakan respon terhadap peluang ekonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif yang menjelaskan hubungan antar variabel dengan menganalisis data numerik (bilangan) menggunakan metode statistik menggunakan pengujian hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang secara teratur dikumpulkan dan disusun dalam bentuk laporan oleh badan-badan yang terlibat dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel (*pooled*) di mana data panel merupakan kombinasi dari data time series dan data cross-sectional. Data time series adalah data yang dikumpulkan tentang individu secara berkala, sedangkan data cross-sectional adalah data yang dikumpulkan antara individu selama periode waktu tertentu (Gujarati, 2012).

Secara umum bentuk regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Dari model di atas maka model penelitian ini dapat dilihat melalui persamaan berikut:

$$Kit = \alpha_0 + \beta_1 KPP_{it} + \beta_2 PDD_{it} + \beta_3 KM_i + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 UMin_{it} + \beta_6 [Mg]_{it} + \epsilon_{it} \quad (2)$$

Kit(Y) kriminalitas, KPP(X1) Kepadatan penduduk, PDDit (X2), Pendidikan (X3), KMi(X4) Kemiskinan, TPTit (X5) tingkat pengangguran terbuka, UMin(X5) Upah Minimum, Mgit Migrasi, β_0 , Intercept/Konstanta $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ dan β_6 : Koefisien Regresi, ϵ_{it} Error term pada periode t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan uji chow nilai chi-square sebesar 0.8596 dengan probabilitas sebesar $0,1275 > 0.05$ maka keputusan adalah menerima H_0 dan menolak H_1 , berdasarkan uji chow maka model yang terpilih adalah common effect

model (CEM) sehingga tidak diperlukan lagi melakukan uji Hausman akan tetapi langsung Jalankan uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan apakah model efek umum atau model efek acak yang paling tepat. Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan apakah *common effect model* (CEM) atau *random effect model* (REM) yang paling tepat untuk mengestimasi data penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam uji *Lagrange Multiplier* sebagai berikut:

H0: Common Effect Model.....(menerima H0)

H1: Random Effect Model.....(menolak H0)

Berdasarkan hasil uji lagrange multiplier didapatkan hasil Both > 0.05 yaitu sebesar 0.1937 dengan keputusan menerima H0 dan menolak H1, sehingga berdasarkan hasil uji langrange multiplier model terpilih untuk menganalisis tingkat kriminalitas adalah Common effect Model (CEM). Karena model terpilih dalam penelitian ini adalah common effect model, maka perlu dilakukan uji asumsi Klasik. Hasil uji asumsi klasik diketahui untuk uji Normalitas Data adalah data terdistribusi secara normal dengan nilai probability > 0,05 yakni sebesar 0,753774.

Untuk uji Multikolenieritas Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil nilai korelasi antar variabel bebas di bawah 0,8 ($r < 0,8$) yang berarti model tidak mengandung masalah multikolinearitas atau asumsi tidak terdapat multikolinearitas dalam model terpenuhi. Pada uji heteroskedastisitas, berdasarkan hasil pengolahan data regresi data panel, angka kriminalitas di 6 wilayah perkotaan di Provinsi Riau mendapat probabilitas. Setiap variabel independen tidak memiliki nilai signifikan ($p\text{-value} > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut homoskedastisitas, atau asumsi tidak ada heteroskedastisitas terpenuhi. Sedangkan untuk uji Autokorelasi di peroleh hasil nilai DW 2.636719, nilai berada antara $dU < d < 4 - dU$ sehingga dapat disimpulkan model tidak mengandung autokorelasi, baik positif maupun negatif.

Dependent Variable: LOG_KRIMINALITAS

Method: Panel Least Squares

Date: 05/01/23 Time: 10:21

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.719823	3.831469	2.014847	0.0558
KEPADATAN_PEND				
UDUK	0.000105	0.000143	0.736819	0.4687
LOG_PENDIDIKAN	1.409762	0.555682	2.536995	0.0184
LOG_PPM	0.141504	0.129074	1.096298	0.2843
TPT	-0.011592	0.015364	-0.754517	0.4582
LOG_UM	-0.740021	0.265301	-2.789358	0.0104
LOG_MM	0.538573	0.121268	4.441165	0.0002

Sumber: Olahan Data Eviews 12

Hasil pengolahan dengan model terpilih yakni CEM, diketahui persamaan Rgeresi data Panel Sebagai berikut:

$$Y=7.719823+0.000105X_1+1,409762X_2+0,141504X_3-0.011592X_4-0.740021X_5+0.538573X_6$$

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable kepadatan penduduk, Pendidikan, kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum dan migrasi masuk terhadap tingkat kriminalitas di 6 kabupaten kota yang ada di propinsi Riau selama kurun waktu 2017-2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

Untuk variable kepadatan penduduk (X_1) dengan nilai koefisien parameter 0,000105 dan nilai prob 0,4687 menunjukan bahwa kepadatan penduduk tidak signifikan mempengaruhi tingkat kriminalitas yang terjadi pada 6 kabupaten Kota di Propinsi Riau, 1 % kenaikan jumlah penduduk menyebabkan kenaikan kriminalitas sebesar 0,0001% ini berarti 6 kabupaten kota di propinsi Riau ini masih memiliki kepadatan penduduk yang rendah sehingga pertambahan penduduk tidak signifikan mempengaruhi tingkat kriminalitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Enrico Ferri Kartono dalam bukunya Social Pathology (2009) menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu kepadatan penduduk. Pertambahan penduduk yang tidak terkendali berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap munculnya masalah-masalah sosial seperti kriminalitas. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Purwanti (2019) dan Wulandari dan Niagawan (2022), yang penelitiannya menemukan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif. dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Berdasarkan hasil penelitian untuk di 6 kabupaten kota dalam penelitian ini laju pertumbuhan penduduk masih terkendali sehingga pergerakan penduduk menjadi lebih luas menyebabkan kecilnya peluang untuk menimbulkan konflik antar penduduk sehingga memperkecil peluang terjadi kriminalitas.

Pada variabel pendidikan (X_2), hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di 6 wilayah perkotaan di Provinsi Riau periode 2017–2021, dengan nilai koefisien parameter probabilitas 1,409762. 0,0184<; 0,05 Hasil penelitian ini berbeda dengan klaim Kansil (1994) bahwa kegiatan kriminal dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Karena pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat membantu seseorang memperoleh pekerjaan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan penghasilan/upah yang akan didapatkan., Justru di 6 kabupaten kota di propinsi Riau di temukan hasil makin tinggi Pendidikan justru makin tinggi tingkat kriminalitas.hasil penelitian ini di duga tidak sebandingnya jumlah lapangan kerja dengan angkatan kerja/pencari kerja yang berpendidikan,sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak masuk dalam pasar kerja dan menyebabkan pengangguran, angka pengangguran yang tinggi dapat memicu terjadinya tindak kriminal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu Steviani dkk (2020), Rahmalia dkk (2019 dan Aranthya dkk (2018) “menemukan hasil bahwa Pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, makin tinggi Pendidikan makin rendah tingkat kriminalitas”

Untuk variabel penduduk miskin, hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter X_3 memiliki nilai koefisien sebesar 0,141504 dan probabilitas sebesar 0,2843 yaitu lebih dari >0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di 6 wilayah perkotaan di Provinsi Riau. Pengaruh penduduk miskin terhadap tingkat kriminalitas tidak signifikan. Dalam studi ini, proporsi penduduk miskin di enam wilayah perkotaan di Provinsi Riau diperkirakan relatif rendah.

Untuk variable tingkat pengangguran hasil penelitian menjelaskan nilai koefisien parameter X_4 sebesar -0,011592 dengan nilai probabilitas 0,4852 adalah lebih sebesar > 0.05. hasil penelitian ini menunjukan hubungan negative dan tidak signifikan, hasil ini di duga jumlah pengangguran yang terjadi hanya bersifat sementara karena beberapa faktor diantara

menganggur karena berusaha mencari pekerjaan yang lebih dengan upah yang lebih besar, maka selama menganggur dapat menggunakan tabungan masa lalu untuk bertahan hidup sehingga penganggur tidak terdorong melakukan Tindakan kriminal. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Rahmalia dkk (2019).

Tingkat upah (X5) yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan hidup para pekerja akan berdampak kepada masalah-masalah sosial seperti masalah kriminalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien variable Upah X5 -0,740021 dengan nilai prob 0.0104. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan antara upah dengan tingkat kriminalitas pada 6 kabupaten/kota pada penelitian ini bahwa makin tinggi tingkat upah makin berkurang tingkat kriminalitas. Tingkat upah yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan hidup para pekerja akan berdampak kepada masalah-masalah sosial seperti masalah kriminalitas. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian Dewantoro (2022) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat upah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas.

Untuk variable migrasi masuk (X6) hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien parameter 0,538573 dengan nilai prob 0.0002, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keimigrasian berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di 6 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Karena migrasi penduduk biasanya mengarah ke daerah dengan perkembangan ekonomi yang “subur” dan faktor ekonomi sangat mempengaruhi migrasi penduduk, hasil penelitian ini konsisten dengan posisi Setiadi (1999). Migrasi masuk ke suatu wilayah menunjukkan semakin padatnya jumlah penduduk di wilayah tujuan migran sehingga dapat meningkatkan permasalahan sosial seperti pengangguran ketiadaan pekerjaan menyebabkan seseorang tidak memperoleh penghasilan untuk biaya hidup sehingga untuk bertahan hidup seseorang dapat melakukan Tindakan kriminalitas.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan, upah minimum dan keimigrasian berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas di 6 wilayah/kota administratif Provinsi Riau periode 2017-2021. Sedangkan variabel kepadatan penduduk, kemiskinan dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di 6 komune/perkotaan di Provinsi Riau periode 2017-2021.

SARAN

Disarankan agar pemerintah daerah di 6 kota dan kabupaten pada penelitian ini agar terus berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin untuk memperkecil peningkatan kriminalitas. Kemudian pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran sehingga dapat menekan angka kriminalitas. Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan melanjutkan penelitian ini dengan memperluas bahasan dengan tambahan variable yang relevan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remaja Rosda Karya.
 Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, Palembang: Penerbit Lindan Bestari, 2020
 Apriani, R. (2019). *Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Pengangguran dan Kepadatan Penduduk terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia* Skripsi. Padang: Universitas Andalas
 BPS,(Badan Pusat Statistik Provinsi Riau) ”Riau dalam Angka tahun 2018-2022
 .Becker, G.S. (1968) *Crime and Punishment: An Economic Approach*, Journal of Political Economy, 70: 1-13
 Becsi Z. Economics and Crime in the States. Econ Rev. Published online 1999.
 Dewantoro, Dimas Mochlas. *Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pdrb Perkapitan, Pengangguran*

- dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kriminalitas di Keresidenan Surakarta Tahun 2015-2020*. Skripsi. 2022
- Gujarati. 2012. *Dasar-dasar ekonometrika* buku 2 edisi 5. Jakarta: Salemba empat
- Giyarsih, S. R., & Fauzi, N. (2016). *Factors that affect urban sprawl symptoms in Sub Urban Areas of Yogyakarta. In The 8th International Graduate Students and Scholars' Conference in Indonesia (IGSSCI)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Idris. 2007. Bahan Ajar: *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. FE UNP. Mangkoesoebroto, M. 1993. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Stie– Ykpn
- Mankiw, N. Gregory. 2012. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi, 2017. "Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Purwanti, evi Yulia. *Analisis factor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi-Qu vol 9 no. 2 (2019)
- Rahmalia, Suci, Ariusni, Mike, Triani. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia*. Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan vol. 1 no 1. 2019
- Sukirno, Sadono *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 "Tentang Ketenagakerjaan".